



PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

Nadya Wicita Cyma^{1*}, Siti Cahya Purnama², Milyssa Nuralifa³, Aos Kuswandi⁴

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2026

Revised Juli, 2026

Accepted Juli, 2026

Available online Juli, 2026

nadyawicitacyma@gmail.com,

purnamasiticahya@gmail.com,

shessmilysas@gmail.com,

koeswandi.all@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute

Abstrak

Media sosial telah menjadi ruang publik digital yang paling banyak diakses masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi arena utama pembentukan opini publik. Artikel ini merupakan kajian pustaka (literature review) yang bertujuan memetakan bagaimana media sosial berperan dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia, mekanisme yang bekerja di baliknya, serta tantangan yang menyertainya. Kajian dilakukan dengan menelaah artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga riset digital, serta dokumentasi kasus kebijakan publik dalam kurun waktu terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial mempercepat sirkulasi informasi kebijakan, memfasilitasi partisipasi warga melalui komentar, tagar, dan kampanye daring, serta mampu mendorong pemerintah merevisi atau membatalkan kebijakan tertentu, sebagaimana terlihat pada kasus penundaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun demikian, dominasi opini di media sosial juga berisiko melahirkan kebijakan yang reaktif, terjebak dalam gelembung filter (filter bubble) dan ruang gaung (echo chamber), serta rentan terhadap disinformasi. Kajian ini merekomendasikan perlunya strategi komunikasi kebijakan pemerintah yang responsif namun tetap berbasis data, disertai penguatan literasi digital masyarakat agar opini publik yang terbentuk lebih rasional dan konstruktif.

Kata Kunci: Media Sosial, Opini Publik, Kebijakan Pemerintah, Komunikasi Politik, Agenda Setting.

Abstract

Social media has become the digital public space most frequently accessed by Indonesian society to obtain information about government policy, while simultaneously serving as the primary arena for public opinion formation. This article presents a literature review aimed at mapping how social media contributes to shaping public opinion toward government policy in Indonesia, the underlying mechanisms, and the accompanying challenges. The review draws on national and international journal articles, digital research institute reports, and documented public policy cases from recent years. The findings indicate that social media accelerates the circulation of policy information, facilitates citizen participation through comments, hashtags, and online campaigns, and can



pressure the government into revising or cancelling certain policies, as seen in the postponement of the Public Housing Savings (Tapera) program and the cancellation of tuition fee increases (UKT). However, the dominance of social media opinion also risks producing reactive policymaking, trapped within filter bubbles and echo chambers, and remains vulnerable to disinformation. This review recommends that government policy communication strategies be responsive yet evidence-based, accompanied by strengthened digital literacy so that the resulting public opinion becomes more rational and constructive.

Keywords: *Social Media, Public Opinion, Government Policy, Political Communication, Agenda Setting.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara masyarakat memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat, termasuk terhadap kebijakan pemerintah. Media sosial tidak lagi sekadar sarana hiburan dan komunikasi interpersonal, melainkan telah berevolusi menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan pertukaran informasi serta artikulasi kepentingan masyarakat secara cepat, luas, dan masif.

Data terbaru menunjukkan skala penetrasi media sosial di Indonesia yang sangat besar. Menurut laporan Digital 2026 yang dirilis DataReportal bersama We Are Social, terdapat sekitar 180 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia pada Oktober 2025, atau setara 62,9 persen dari total populasi, dengan jumlah pengguna internet mencapai 230 juta jiwa atau 80,5 persen penetrasi (DataReportal, 2026). Skala penggunaan sebesar ini menempatkan media sosial sebagai kanal utama masyarakat dalam mengakses berita, termasuk isu-isu kebijakan publik, sekaligus menjadikannya arena strategis dalam proses komunikasi politik dan demokrasi di era digital (Zordi et al., 2026).

Karakter media sosial yang interaktif, real-time, dan partisipatif mendorong masyarakat untuk tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen opini yang aktif. Melalui unggahan, komentar, like, share, maupun tagar (hashtag), pandangan individu terhadap suatu kebijakan dapat berkembang menjadi opini kolektif dalam waktu singkat. Kondisi ini menggeser dinamika hubungan antara negara dan warga negara: pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal penentu agenda publik, karena opini yang berkembang di ruang digital mampu menekan, mengarahkan, bahkan mengubah proses pengambilan kebijakan (Zordi et al., 2026).

Sejumlah peristiwa kebijakan di Indonesia memperlihatkan kuatnya pengaruh opini publik berbasis media sosial. Penundaan implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada pada 2024, hingga penangguhan izin impor susu merupakan contoh konkret bagaimana tekanan opini publik di media sosial memengaruhi keputusan pemerintah (Zordi et al., 2026). Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi kanal utama artikulasi aspirasi publik sekaligus instrumen kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Meskipun demikian, dominasi media sosial dalam pembentukan opini publik turut menimbulkan tantangan tersendiri. Respons kebijakan yang terlalu bergantung pada tekanan opini viral berpotensi melahirkan kebijakan yang bersifat reaktif dan kurang berbasis kajian akademik maupun data empiris. Fenomena ruang gaung (echo chamber) dan gelembung filter (filter bubble)



turut memperkuat opini tertentu secara berulang tanpa melalui proses deliberasi yang inklusif, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak selalu merepresentasikan kepentingan publik secara menyeluruh (Cinelli et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun sebagai kajian pustaka yang bertujuan untuk (1) memetakan bagaimana media sosial berperan dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah, (2) menjelaskan mekanisme dan kerangka teoretis yang melandasi proses tersebut, serta (3) mengidentifikasi tantangan dan implikasinya bagi komunikasi kebijakan pemerintah di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal yang komprehensif, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi, mengenai keterkaitan antara media sosial, opini publik, dan kebijakan publik di era digital.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Media Sosial sebagai Ruang Publik Digital

Konsep ruang publik (public sphere) yang dikemukakan Habermas (1989) menggambarkan suatu arena sosial tempat warga negara dapat berkumpul secara bebas untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi persoalan sosial, yang pada gilirannya memengaruhi tindakan politik. Di era digital, media sosial diargumentasikan sebagai perluasan sekaligus transformasi dari ruang publik tersebut ke dalam bentuk virtual. Platform seperti Facebook, Instagram, X (dahulu Twitter), TikTok, dan YouTube memungkinkan warga berdiskusi, menyebarkan informasi, dan menyampaikan kritik maupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah tanpa batasan ruang dan waktu (Zordi et al., 2026).

Berbeda dari media massa konvensional yang tunduk pada mekanisme penjagaan gerbang (gatekeeping) oleh redaksi, media sosial relatif tidak memiliki penyaringan berlapis sebelum pesan disebarluaskan. Karakter inilah yang membuat media sosial dinilai lebih cepat, lebih mudah diakses, dan memungkinkan interaksi langsung antara pengunggah konten dan khalayak, sehingga secara bertahap menggeser sebagian peran media massa konvensional dalam pembentukan opini publik (Qadri, t.t.).

Teori Agenda Setting

Teori agenda setting yang dikembangkan McCombs dan Shaw (1972) menjelaskan bahwa media tidak selalu berhasil memberi tahu khalayak apa yang harus dipikirkan, tetapi sangat berhasil memberi tahu khalayak apa yang perlu dipikirkan. Media menentukan isu yang mendapatkan sorotan (agenda media), yang kemudian memengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat (agenda publik), dan pada akhirnya turut membentuk isu yang menjadi perhatian pembuat kebijakan (agenda kebijakan). Dalam konteks media sosial, proses ini berlangsung lebih cepat dan lebih terdesentralisasi karena setiap pengguna berpotensi menjadi penyusun agenda (agenda setter), bukan hanya institusi media formal (Zordi et al., 2026).

Studi Gilardi, Shipan, dan Wüest (2022) mengenai media sosial dan penyusunan agenda politik menunjukkan bahwa perhatian publik yang terbentuk di platform digital dapat memengaruhi prioritas isu yang direspons oleh aktor kebijakan, meskipun hubungan tersebut bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh konteks politik masing-masing negara. Dalam era digital, fragmentasi media dan pola konsumsi informasi yang individual turut menimbulkan diversifikasi agenda, karena setiap pengguna cenderung mengonsumsi informasi sesuai preferensinya, sehingga



interpretasi terhadap prioritas publik menjadi semakin kompleks bagi pembuat kebijakan (Zordi et al., 2026).

Teori Spiral Keheningan

Teori spiral keheningan (*spiral of silence*) yang dikemukakan Noelle-Neumann (1974) menjelaskan bahwa individu cenderung menyembunyikan pendapatnya apabila merasa pendapat tersebut berbeda dari opini mayoritas yang dipersepsikan, karena kekhawatiran akan isolasi sosial. Semakin seseorang merasa pendapatnya sejalan dengan arus utama, semakin besar pula keberaniannya untuk menyuarakan pendapat tersebut secara terbuka, sehingga opini mayoritas semakin dominan sementara opini minoritas semakin senyap.

Dalam konteks media sosial, dinamika spiral keheningan menjadi lebih kompleks. Dashti, Al-Abdullah, dan Johar (2015) dalam studinya terhadap wacana politik mahasiswa Kuwait di Twitter menemukan bahwa anonimitas dan sifat jaringan media sosial dapat mengubah pola spiral keheningan konvensional, karena pengguna kadang merasa lebih leluasa menyuarakan pendapat minoritas di ruang digital dibandingkan di ruang sosial langsung. Namun demikian, tekanan konformitas berupa serangan siber (*cyberbullying*), pengucilan digital, atau serbuan komentar negatif tetap berpotensi membungkam opini yang dianggap tidak populer, sehingga spiral keheningan tetap relevan digunakan untuk menganalisis dinamika opini publik di media sosial.

Opini Publik dan Kebijakan Pemerintah

Opini publik dipahami sebagai kumpulan pandangan individu mengenai suatu isu yang bersifat kontroversial atau relevan secara sosial, yang terbentuk melalui proses interaksi dan pertukaran informasi dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan pemerintah, opini publik berfungsi ganda: sebagai umpan balik (*feedback*) atas kebijakan yang telah atau akan diterapkan, sekaligus sebagai instrumen kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah (Adiwibowo & Larasati, 2025).

Yuan dkk. (2023) menekankan bahwa transformasi digital pemerintahan turut mengubah pola relasi antara negara dan warga, di mana media sosial pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai kanal penyampaian informasi satu arah, tetapi juga sebagai ruang dialog yang memungkinkan pemerintah menangkap sentimen publik secara langsung. Pergeseran ini menuntut pemerintah untuk mengembangkan kapasitas komunikasi digital yang responsif tanpa mengorbankan prinsip kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

3. METODE

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kajian pustaka (*literature review*) dengan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional terindeks yang relevan dengan topik media sosial, opini publik, dan komunikasi kebijakan, ditambah laporan statistik digital dari lembaga riset seperti DataReportal dan We Are Social, serta dokumentasi berita mengenai kasus-kasus kebijakan pemerintah di Indonesia yang dipengaruhi oleh dinamika opini publik di media sosial.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, penelusuran dan seleksi literatur yang relevan dengan kata kunci “media sosial”, “opini publik”, dan “kebijakan pemerintah”. Kedua, kategorisasi temuan ke dalam tema-tema utama, yaitu fungsi media sosial dalam komunikasi kebijakan, mekanisme pembentukan opini publik digital, serta risiko dan tantangan



penggunaannya dalam konteks kebijakan pemerintah. Ketiga, sintesis dan interpretasi dengan membandingkan temuan antartudi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kecenderungan umum, yang kemudian disusun menjadi narasi pembahasan yang koheren.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Peran Media Sosial dalam Wacana Kebijakan

Kehadiran media sosial telah menggeser pola komunikasi kebijakan dari model satu arah (top-down) menjadi lebih terbuka, dialogis, dan responsif. Jika pada era media massa konvensional pemerintah relatif dominan dalam menentukan narasi kebijakan yang beredar di masyarakat, maka pada era media sosial, warga memiliki kanal langsung untuk menyampaikan kritik, dukungan, maupun tuntutan klarifikasi tanpa harus melalui perantara redaksi media (Zordi et al., 2026).

Pergeseran ini sejalan dengan temuan Adiwibowo dan Larasati (2025) yang menunjukkan bahwa intensitas pemberitaan dan pengaturan sudut pandang di media, termasuk media sosial, dapat mengarahkan opini publik dan membentuk persepsi masyarakat terhadap aktor politik maupun kebijakan tertentu. Kepercayaan terhadap sumber informasi turut menjadi faktor penting yang menentukan sejauh mana dampak media terhadap persepsi publik, sehingga kredibilitas akun atau pihak yang menyebarkan informasi kebijakan menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan.

Mekanisme Pembentukan Opini Publik Digital

Terdapat beberapa mekanisme yang menjelaskan bagaimana opini publik terhadap kebijakan pemerintah terbentuk di media sosial. Pertama, mekanisme viralitas, yaitu proses penyebaran konten secara eksponensial melalui fitur share, retweet/repost, dan duet/stitch pada platform video pendek, yang membuat suatu isu kebijakan dapat menjangkau jutaan pengguna dalam hitungan jam. Kedua, mekanisme partisipasi kolektif, di mana warga tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut memproduksi opini melalui komentar, unggahan pribadi, maupun kampanye bertagar (hashtag campaign) yang mengorganisasi dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan (Zordi et al., 2026).

Ketiga, mekanisme algoritmik, yaitu cara kerja algoritme platform yang cenderung menyajikan konten berdasarkan pola interaksi pengguna sebelumnya. Mekanisme ini dapat memperkuat paparan terhadap sudut pandang yang sudah disukai pengguna, sehingga berpotensi menciptakan gelembung filter (filter bubble) yang mempersempit keragaman informasi yang diterima. Studi Cinelli dkk. (2021) mengenai efek ruang gaung (echo chamber effect) menegaskan bahwa struktur jejaring dan algoritme rekomendasi pada berbagai platform media sosial cenderung mendorong pengelompokan pengguna berdasarkan kesamaan pandangan, yang pada gilirannya dapat memperkuat polarisasi opini terhadap isu-isu kontroversial, termasuk kebijakan publik.

Keempat, mekanisme e-partisipasi, yaitu pelibatan warga secara digital dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan. E-partisipasi mendorong keterlibatan sipil dan tata kelola yang lebih terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, di mana warga tidak hanya menyampaikan opini secara spontan tetapi juga dilibatkan secara lebih terstruktur melalui kanal digital resmi pemerintah maupun forum diskusi daring (Zordi et al., 2026).



Studi Kasus: Pengaruh Opini Publik Digital terhadap Kebijakan di Indonesia

Beberapa kasus kebijakan di Indonesia dapat dijadikan ilustrasi konkret mengenai bagaimana opini publik di media sosial memengaruhi keputusan pemerintah. Kasus pertama adalah penundaan implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan yang mewajibkan pemotongan gaji pekerja untuk iuran tabungan perumahan ini memicu penolakan luas di media sosial, dengan warganet ramai menyuarakan keberatan melalui berbagai platform, hingga akhirnya pemerintah menunda pemberlakuan kebijakan tersebut (Zordi et al., 2026).

Kasus kedua adalah pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada 2024. Protes mahasiswa di berbagai kampus yang diperkuat dengan kampanye tagar dan unggahan keluhan di media sosial mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatalan kenaikan UKT untuk tahun ajaran tersebut. Kasus ini memperlihatkan bagaimana tekanan opini publik yang terorganisasi secara digital dapat mempercepat respons pemerintah terhadap keluhan kelompok masyarakat tertentu (Zordi et al., 2026).

Kasus ketiga adalah penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada pada Agustus 2024, yang dipicu oleh gelombang kampanye daring bertajuk “Peringatan Darurat” setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah dianggap hendak dianulir melalui revisi undang-undang. Tekanan opini publik yang masif di media sosial, yang kemudian bermuara pada demonstrasi di berbagai kota, mendorong DPR RI menunda pengesahan revisi tersebut (Zordi et al., 2026). Kasus-kasus tersebut menegaskan peran media sosial sebagai instrumen kontrol sosial yang nyata dalam proses kebijakan publik di Indonesia, sekaligus memperlihatkan pergeseran dari model kebijakan yang sepenuhnya ditentukan pemerintah menjadi model yang lebih responsif terhadap tekanan opini digital.

Tantangan: Disinformasi, Polarisasi, dan Kebijakan Reaktif

Di balik manfaatnya dalam memperluas partisipasi publik, dominasi media sosial dalam pembentukan opini terhadap kebijakan pemerintah juga menghadirkan sejumlah tantangan serius. Tantangan pertama adalah disinformasi. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial tidak selalu diimbangi dengan proses verifikasi, sehingga berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya dapat memengaruhi opini publik secara keliru sebelum klarifikasi resmi disampaikan pemerintah.

Tantangan kedua adalah polarisasi opini yang diperkuat oleh mekanisme algoritmik. Sebagaimana ditemukan Cinelli dkk. (2021), struktur ruang gaung pada platform media sosial cenderung mengelompokkan pengguna berdasarkan kesamaan pandangan, sehingga perdebatan publik terhadap kebijakan pemerintah kerap terjebak dalam polarisasi antara kelompok pendukung dan penolak tanpa ruang dialog yang substantif.

Tantangan ketiga adalah kecenderungan lahirnya kebijakan yang bersifat reaktif atau dikenal dengan istilah *viral-based policy*. Ketergantungan pemerintah pada tekanan opini viral berpotensi melahirkan kebijakan jangka pendek yang kurang didukung kajian akademik dan data empiris memadai, sehingga substansi kebijakan dapat terabaikan demi meredam gejolak opini publik secara cepat (Zordi et al., 2026). Tantangan keempat adalah ketimpangan representasi, karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses dan literasi digital yang setara untuk menyuarakan aspirasinya di ruang digital, sehingga opini yang tampak dominan di media sosial belum tentu mencerminkan kepentingan publik secara menyeluruh.



Implikasi bagi Komunikasi Kebijakan Pemerintah

Dinamika di atas menuntut pemerintah untuk mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap era digital, tanpa mengorbankan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Setidaknya terdapat tiga implikasi penting. Pertama, pemerintah perlu membangun mekanisme komunikasi digital yang responsif namun tetap berbasis data, dengan menempatkan respons cepat terhadap isu viral sebagai langkah awal meredakan ketidakpastian informasi, bukan sebagai dasar tunggal pengambilan keputusan kebijakan.

Kedua, diperlukan sistem pemantauan sentimen publik yang dikelola secara etis dan transparan untuk mendukung analisis kebijakan, bukan sekadar mengukur popularitas suatu isu di media sosial. Ketiga, penguatan kanal partisipasi publik yang lebih inklusif, baik daring maupun luring, diperlukan agar aspirasi masyarakat yang terjaring tidak hanya berasal dari kelompok yang paling vokal dan aktif secara digital, melainkan juga menjangkau kelompok dengan akses digital yang terbatas (Zordi et al., 2026). Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi kebutuhan mendesak agar opini publik yang terbentuk di media sosial semakin rasional, berbasis fakta, dan berorientasi pada penyelesaian masalah kebijakan secara konstruktif.

5. SIMPULAN

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran strategis dan ambivalen dalam pembentukan opini publik terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia. Di satu sisi, media sosial mempercepat sirkulasi informasi kebijakan, memperluas partisipasi warga, dan mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, sebagaimana tampak pada kasus penundaan Tapera, pembatalan kenaikan UKT, dan penundaan pengesahan RUU Pilkada. Mekanisme pembentukan opini tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka teori agenda setting dan spiral keheningan, yang keduanya mengalami transformasi signifikan ketika beroperasi dalam ekosistem media sosial yang bersifat interaktif, algoritmik, dan terdesentralisasi.

Di sisi lain, dominasi opini media sosial juga membawa risiko berupa disinformasi, polarisasi akibat gelembung filter dan ruang gaung, kecenderungan kebijakan yang reaktif, serta ketimpangan representasi aspirasi publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola komunikasi kebijakan secara strategis: cepat dalam merespons dinamika opini publik, namun tetap cermat dan berbasis data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Penguatan literasi digital masyarakat serta perluasan kanal partisipasi yang inklusif menjadi kunci agar peran media sosial dalam pembentukan opini publik dapat dioptimalkan untuk memperkuat kualitas demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia.

Kajian ini masih bersifat konseptual dan berbasis tinjauan literatur, sehingga penelitian lanjutan yang bersifat empiris—misalnya melalui analisis sentimen media sosial, survei persepsi publik, atau studi kasus mendalam pada kebijakan tertentu—akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan sebab-akibat antara opini publik digital dan keputusan kebijakan pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, B. S., & Larasati, A. (2025). Peran media sosial dalam pembentukan opini publik dan pola partisipasi politik generasi milenial. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(11), 4920-4928. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i11.2988>
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118.
- Citra, D., Agustin, L. A., Saputri, L. E., Alif, M. H., & Nisa, P. K. (2024). Pembentukan opini publik dalam fenomena “Buat apa sekolah?” di aplikasi TikTok. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(4), 17-27.
- Dashti, A. A., Al-Abdullah, H. H., & Johar, H. A. (2015). Social media and the spiral of silence: The case of Kuwaiti female students' political discourse on Twitter. *Journal of International Women's Studies*, 16(3), Article 4.
- DataReportal. (2026). Digital 2026: Indonesia. We Are Social & DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2026-indonesia>
- Gilardi, F., Shipan, C. R., & Wüest, B. (2022). Social media and political agenda setting. *Political Communication*, 39(1), 39-60.
- Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. MIT Press.
- Katz, E., & Blumler, J. G. (1974). The uses of mass communications: Current perspectives on gratifications research. Sage Publications.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.
- Noelle-Neumann, E. (1974). The spiral of silence: A theory of public opinion. *Journal of Communication*, 24(2), 43-51.
- Qadri, M. (t.t.). Pengaruh media sosial dalam membangun opini publik. *Qaumiyyah: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam*.
- Yuan, Y.-P., Dwivedi, Y. K., Tan, G. W.-H., Cham, T.-H., Ooi, K.-B., Aw, E. C.-X., & Currie, W. (2023). Government digital transformation: Understanding the role of government social media. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101775.
- Zordi, D. A., Ihsan, M. S., Nazarudin, M. A., & Patrianti, T. (2026). Peran media sosial dalam pembentukan opini publik dan dinamika kebijakan pemerintah di era digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 3(1), 154-162. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v3i1.882>